



I. PENDAHULUAN

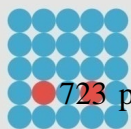
1.1. Latar Belakang

Setelah terjadi kerusuhan bulan Mei 1998, investasi di Indonesia mengalami penurunan cukup drastis. Keadaan ini membawa akibat bukan saja pada ekonomi secara nasional, tetapi juga pada perekonomian daerah. Bila tahun-tahun sebelumnya para investor seakan berlomba untuk menanamkan investasinya, namun sejak terjadinya kerusuhan Mei 1998, para investor tampaknya harus berpikir panjang untuk melakukan kegiatan usaha di Indonesia. Tabel 1 menunjukkan pergerakan investasi, baik Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA) yang disetujui Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dari tahun 1997 sampai dengan 2003.

Tabel 1. Investasi Yang Disetujui BKPM

Tahun	PMDN				PMA			
	Persetujuan Investasi	Miliar (Rp)	Realisasi Investasi	Miliar (Rp)	Persetujuan Investasi	US\$	Realisasi Investasi	US\$
1997	723	119.877	344	18.435	781	33.788	322	3.068
1998	327	57.973	286	16.375	1.033	13.649	402	4.794
1999	237	53.492	251	16.320	1.176	10.884	491	5.788
2000	392	94.025	287	20.082	1.542	16.075	615	8.706
2001	264	58.816	145	7.543	1.334	15.056	376	2.789
2002	188	25.230	105	11.035	1.151	9.795	425	9.515
2003	174	46.841	95	8.192	891	12.491	451	4.974

Sumber : BKPM, 2004



Jika pada tahun 1997 investasi PMDN yang disetujui BKPM mencapai 723 proyek dengan realisasi 344 proyek, maka sejak terjadinya kerusuhan tahun 1998 sampai dengan tahun 2003 secara rata-rata jumlah investasi PMDN yang disetujui BKPM terus mengalami penurunan yang sangat signifikan. Kalau pada tahun 1998 investasi yang disetujui sebanyak 327 proyek dengan realisasi 286

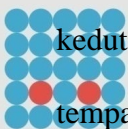


Hak cipta dilindungi Undang-Undang

proyek, maka tahun 2003, investasi yang disetujui BKPM hanya mencapai 174 proyek dengan realisasi 95 proyek - suatu penurunan yang sangat drastis. Berbeda dengan PMDN, Penanaman Modal Asing (PMA) justru mengalami kenaikan pada tahun 1998 sampai tahun 2000. Salah satu penyebab kenaikan investasi tersebut adalah apresiasi mata uang asing terhadap rupiah, sehingga PMA tertarik untuk melakukan investasi di Indonesia. Kenaikan investasi PMA tersebut tidak mampu bertahan lama, karena kondisi di Indonesia yang tidak menentu, dan sejak tahun 2001 sampai akhir tahun 2003 sebagaimana terlihat dalam Tabel 1 terus mengalami penurunan, dimana investasi yang disetujui BKPM hanya mencapai 890 proyek dengan realisasi 451 proyek (BKPM, 2004).

Penurunan investasi PMDN dan PMA disebabkan berbagai faktor, antara lain belum pulihnya kepercayaan dunia internasional terhadap Indonesia terutama yang berkaitan dengan kondisi keamanan, kepastian hukum dan kenyamanan investasi di daerah. Salimianto (2004) mengemukakan, pada umumnya, investor asing lebih memilih menunggu (*wait and see*) atas hasil Pemilu 2004, sementara pemodal domestik cenderung memilih kompensasi kemudahan perijinan dalam kegiatan investasi.

Keadaan ini semakin diperparah oleh beberapa peristiwa lain, yang semakin menambah keengganan para investor untuk melakukan kegiatan usaha di Indonesia. Peledakan bom di Legian, Bali, Hotel J.W. Marriot, serta di depan kedutaan besar Australia, di Jakarta memberi kesan bahwa Indonesia bukanlah tempat yang aman. Aksi demo para buruh yang terjadi di beberapa kota menunjukkan bahwa tenaga kerja Indonesia banyak tuntutan. Kasus penjualan saham PT. Kaltim Prima Coal dan kasus *spin off* semen PT. Semen Padang



Program Pascasarjana Manajemen dan Bisnis
Institut Pertanian Bogor

MIB-IPB

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

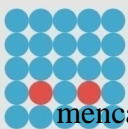


merupakan contoh kasus yang mencerminkan bahwa peraturan di Indonesia dapat direayasa untuk kepentingan tertentu. Peristiwa-peristiwa tersebut memberikan kesan Indonesia bukan lagi tempat yang aman dan nyaman untuk investasi. Indonesia memiliki *country risk* yang tinggi bagi para investor.

Hengkangnya Sony dari Indonesia ke Malaysia, sebuah perusahaan elektronika yang berkantor pusat di Jepang, merupakan indikasi nyata dari kekhawatiran para investor. Beberapa keunggulan yang dimiliki Indonesia sebagai negara tujuan investasi, seperti besarnya jumlah penduduk yang merupakan pasar potensial, tenaga kerja dengan standar upah yang relatif murah, serta tersedianya sumber daya alam yang melimpah, ternyata tidak cukup kuat untuk menahan keinginan para investor yang ingin memindahkan usahanya keluar dari Indonesia.

Suatu kajian yang dilakukan oleh UNCTAD tahun 2003 menyimpulkan bahwa Indonesia berada pada urutan 138 dari 140 negara dalam usahanya untuk menarik investasi luar negeri. Kajian yang dibuat berdasarkan data tahun 1999-2001 tersebut menunjukkan bahwa Indonesia lebih baik hanya jika dibandingkan dengan dua negara terjelek dalam menarik investor asing, yaitu Gabon dan Suriname (Muhammad, 2003). Lesunya kegiatan investasi di Indonesia juga bisa dilihat dari proporsi kredit yang dikucurkan oleh perbankan. Kredit untuk investasi selama tahun 2003 yang dikucurkan oleh perbankan hanya 27,7%, menunjukkan bahwa iklim investasi di Indonesia sudah sedemikian parah.

Dalam rangka meningkatkan investasi di Indonesia, pemerintah telah mencanangkan tahun 2003 sebagai tahun investasi. Pemerintah berharap, mulai tahun 2003 investasi akan meningkat kembali. Beberapa upaya telah dilakukan pemerintah untuk meningkatkan investasi, dengan pelayanan investasi satu atap



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.



Hak cipta dilindungi Undang-Undang

yang dilaksanakan oleh BKPM, kemudahan perijinan, keringanan pajak, peningkatan kondisi ekonomi makro, serta strategi untuk menjadikan pemerintah kabupaten/kota sebagai sumber pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Upaya pemerintah untuk meningkatkan kinerja ekonomi makro mulai menampakkan hasil pada akhir 2003.

Bank Indonesia telah berhasil menekan tingkat laju inflasi secara meyakinkan, dari 15,13% pada awal bulan Pebruari 2002 hingga menjadi 5,33% pada bulan Nopember 2003. Tingkat inflasi yang rendah dan stabil diharapkan dapat menjadi stimulus bagi para pelaku bisnis untuk memulai kegiatan usaha baru. Sementara itu, selama dua tahun terakhir, suku bunga SBI terus menurun dari 17,50% pada awal Januari 2002, hingga menjadi 8,06% pada pertengahan bulan Januari 2004. Sudah barang tentu, kondisi ekonomi makro tersebut sangat menggembirakan dunia usaha, dan diharapkan para investor bergairah untuk melakukan investasi (Bank Indonesia, 2004).

Untuk menghadapi kondisi tersebut, bagaimana kesiapan pemerintah kabupaten/kota, apakah mereka sudah mengantisipasi perkembangan ekonomi makro tersebut dengan kebijakan-kebijakan yang kondusif bagi dunia usaha ? Sejalan dengan semangat otonomi daerah dimana pemerintah kabupaten/kota merupakan instansi pemerintah yang diberi kewenangan untuk mengatur investasi di daerahnya, Pemerintah kabupaten/kota diharapkan mampu menata diri agar investasi di daerahnya meningkat, dengan cara meningkatkan fasilitas serta sarana dan prasarana yang dibutuhkan para investor, serta menghilangkan hambatan yang mengganggu dunia usaha dan investasi, misalnya PERDA tentang pemungutan pajak atau retribusi daerah yang tidak pada tempatnya (Bisnis Indonesia, 2003).



Hak cipta dilindungi Undang-Undang

MB-IPB

Program Pascasarjana Manajemen dan Bisnis
Institut Pertanian Bogor

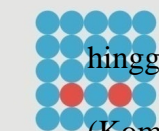
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.



Hak cipta dilindungi Undang-Undang

Hasil evaluasi yang dilakukan oleh Departemen Keuangan menunjukkan bahwa lebih dari 200 Peraturan Daerah tentang berbagai pungutan tidak mendukung kegiatan bisnis dan investasi. Departemen Keuangan menyarankan agar pemerintah kabupaten/kota segera mencabut perda-perda yang tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang. Para investor dan pengusaha mengeluh bahwa dengan adanya perda-perda tersebut telah terjadi pungutan yang tumpang tindih, yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah propinsi, maupun pemerintah kabupaten/kota (Kompas, 2003). Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Toemion (2003), menyatakan bahwa pertumbuhan PMA di Indonesia masih terkendala, di antaranya menyangkut keamanan, kepastian, penegakan hukum, perburuhan, perundang-undangan, prasarana infrastruktur, intervensi pemerintah melalui berbagai kebijakan tata niaga komoditas dan struktur pasar yang mengarah pada sistem monopoli. Beberapa masalah sempat mengemuka di media massa sebagai penyebab rendahnya investasi di Indonesia antara lain banyaknya pungutan-pungutan yang membebani dunia usaha, kondisi ketenagakerjaan Indonesia yang kurang produktif dan banyak tuntutan, serta kondisi keamanan yang kurang kondusif untuk melakukan kegiatan usaha.

Upaya pemerintah kabupaten/kota untuk menarik investor memiliki arti strategis. Di samping sasaran untuk pertumbuhan ekonomi jangka panjang, investasi juga diharapkan untuk mengurangi pengangguran. Sebagai catatan, hingga akhir tahun 2001 tingkat pengangguran di Indonesia mencapai 8,1% (Kompas, 2003). Belajar dari pengalaman ini, kiranya Pemerintah Kabupaten/Kota perlu mengevaluasi diri, seberapa jauh Pemerintah Kabupaten/Kota telah mempersiapkan diri untuk menarik minat para investor



Program Pascasarjana Manajemen dan Bisnis
Institut Pertanian Bogor
MIB-IPB

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.



dengan menyediakan faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan investasi. Berkaitan dengan daya tarik investasi daerah, pada tahun 2002 Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) melakukan survey dengan membuat peringkat daya tarik investasi daerah, antara lain dengan menggunakan indikator-indikator kelembagaan, sosial-budaya, ekonomi daerah, tenaga kerja dan produktivitas, serta infrastruktur fisik.

Salah satu kabupaten yang belum diteliti oleh KPPOD mengenai daya tarik investasi kabupaten/kota di Indonesia, adalah Kabupaten Temanggung. Data perkembangan industri di Kabupaten Temanggung menunjukkan bahwa terdapat 14.362 perusahaan, yang terdiri dari perusahaan besar, sedang, kecil dan rumah tangga dengan menyerap tenaga kerja sebanyak 57.890 orang. Luas daerah mencapai 826,39 km², dengan jumlah penduduk 651.729 jiwa (Centre for Political Studies Soegeng Sarjadi Syndicated, 2002). Dari data Temanggung Dalam Angka yang diterbitkan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Temanggung 2003, memperlihatkan banyaknya unit usaha industri, tenaga kerja dan investasi industri menurut kelompoknya sebagaimana terlihat dalam Tabel 2.

Tabel 2. Industri Kabupaten Temanggung Tahun 2002

Kelompok Industri	Unit Usaha	Tenaga Kerja	Investasi (juta rp)
1. Hasil pertanian	7.933	35.297	8.880
2. Hasil Perkebunan dan hasil hutan	4.769	17.875	74.704
3. Logam, kimia, mesin, alat angkut dan perekayasaan	1.112	3.452	1.945
4. Elektronika dan Aneka	548	1.266	3.338
Jumlah	14.362	57.890	88.867

Sumber : BPS, 2003

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

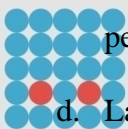


Disamping industri-industri yang telah ada, masih banyak potensi ekonomi lain yang masih dapat dikembangkan di Kabupaten Temanggung, seperti sektor pariwisata dan lain-lain. Untuk mengembangkan potensi yang ada, Pemda harus mampu mendatangkan investor baru agar berminat menanamkan modalnya di Kabupaten Temanggung. Hadirnya investor, diharapkan membawa dampak positif dan mempercepat pertumbuhan perekonomian, yang pada gilirannya akan memberi nilai tambah bagi masyarakat kabupaten ini. Upaya yang perlu dilakukan agar calon investor tertarik melakukan investasi, Pemda harus menyiapkan faktor-faktor yang dianggap penting oleh investor dalam rangka pengambilan keputusan investasi. Dari gambaran data di atas, Kabupaten Temanggung sangat menarik untuk dikaji.

1. Perumusan Masalah

Dalam rangka meningkatkan investasi di Kabupaten Temanggung, beberapa masalah yang dirumuskan pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

- Faktor-faktor apa saja yang dianggap penting oleh investor dalam pengambilan keputusan investasi.
- Apakah Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung telah menyiapkan faktor-faktor yang dianggap penting oleh investor untuk keputusan investasi.
- Apakah ada perbedaan persepsi terhadap faktor-faktor tersebut, antara aparat pemerintah Kabupaten Daerah Temanggung dengan para investor.
- Langkah-langkah strategis apa yang harus dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung agar mampu menarik investor.





1.3. Tujuan Penelitian

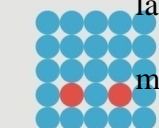
Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Mengidentifikasi faktor-faktor yang dianggap penting oleh investor dalam pengambilan keputusan investasi;
- b. Menganalisa sejauh mana Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung menyiapkan faktor-faktor yang dianggap penting bagi investor dalam pengambilan keputusan investasi.
- c. Menguji perbedaan persepsi terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan investasi, antara aparat pemerintah Kabupaten Daerah Temanggung dengan para investor;
- d. Merumuskan langkah-langkah strategis yang harus dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung agar mampu menarik investor.

1.3. Manfaat Penelitian

Pelaksanaan Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut :

- a. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai masukan atau bahan pertimbangan untuk merumuskan langkah kebijakan yang strategis dalam rangka meningkatkan minat investor melakukan investasi di Kabupaten Temanggung.
- b. Bagi penulis, penelitian ini dapat menjadi suatu pengalaman praktis, khususnya dalam melihat kesiapan dari pemerintah kabupaten dalam menarik investor.



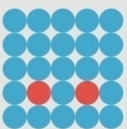


Hak cipta dilindungi Undang-Undang

1.5. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini hanya terbatas pada analisis kesiapan Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung dalam upaya menarik investor melalui pendekatan kualitatif yakni : studi lapang, wawancara, dan pengisian kuesioner. Pengisian kuesioner diarahkan kepada dua pihak yang berkepentingan yaitu aparat Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung dan para pelaku usaha (Investor). Pendekatan kepada aparat Pemerintah Kabupaten Daerah Temanggung dilakukan melalui *Focused Discussion Group (FGD)*, dilanjutkan dengan identifikasi perbedaan persepsi terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan investasi, antara aparat Pemerintah Kabupaten Daerah Temanggung dengan para investor. Pada akhir penelitian ini akan dirumuskan serta rekomendasi langkah-langkah strategis yang harus dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Temanggung dalam upaya meningkatkan investasi di Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah.

Hak cipta milik IPB tahun 2005



MB-IPB
Program Pascasarjana Manajemen dan Bisnis
Institut Pertanian Bogor

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.